

# **PERJANJIAN KINERJA**

**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG R.I  
TAHUN 2022**



**ESELON I**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA**  
**Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.  
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH  
Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

**Pihak pertama** pada tahun 2022, dengan ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2022

Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Pihak Kedua

  
Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH

Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI  
Pihak Pertama

  
H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA (PK) 2022 KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
Terwujudnya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan	-
	2. Persentase penanganan pengaduan tepat waktu	75%		-
	3. Persentase hukuman disiplin yang dipublikasikan	100%		-
	4. Persentase laporan hasil pemeriksaan kasus yang tepat waktu	100%		Rp 6.705.720.000
Terselenggaranya Pengawasan Internal dan Eksternal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti	80%		-
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	80%		Rp 72.080.000
	3. Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	100%		-
Terselenggaranya manajemen peradilan dan administrasi umum secara efektif, efisien dan akuntabel	1. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pengawasan reguler	81 LHP		Rp 3.578.345.000
	2. Jumlah Pengadilan yang dilakukan pemeriksaan kinerja dan integritas	73 LHP		Rp 3.231.804.000
	3. Jumlah Pengadilan yang dilakukan audit barang dan jasa	5 LHP		Rp 284.136.000
	4. Jumlah Satuan Kerja yang telah dilakukan pemeriksaan keuangan	8 LHP	Rp 295.080.000	
	5. Jumlah Evaluasi LKjIP yang selesai dilakukan	9 LHP	Rp 317.268.000	
	6. Peningkatan Zona Integritas	158 LHP	Rp 6.650.474.000	
	7. Pemeriksaan Probity	10 Kegiatan	Rp 212.168.000	
	8. Jumlah Quality Assurance pengelolaan keuangan yang terlaksana	2 Kegiatan	Rp 743.276.000	
			Dukungan manajemen dan dukungan teknis	

	9. Jumlah Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas Bidang	2 Kegiatan	lainnya	Rp 644.960.000
	10. Jumlah Pegawai yang mengikuti assesment	20 Orang		Rp 115.000.000
	11. Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan	2 Kegiatan		Rp 899.390.000
	12. Jumlah Sidang Majelis Kehormatan Hakim yang dilaksanakan	20 LHP		Rp 100.000.000

Jumlah Anggaran : **Rp23.849.701.000 ,-**

Program : Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan serta Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya